

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang secara terus menerus tumbuh akan menimbulkan stabilnya kondisi harga dan terbukanya kesempatan peningkatan pembangunan yang luas, baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik dapat dicontohkan seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan ataupun pembangunan gedung bangunan dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik dapat dicontohkan seperti pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam hal peningkatan pendidikan atau peningkatan layanan kesehatan namun dalam kenyataannya kondisi perekonomian di suatu negara pada umumnya mengalami fluktuasi, tidak terkecuali Indonesia. Fluktuasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa GDP per kapita (sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi) Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu dari US \$ 3,647.6 ke US \$ 3,700.5. Pada tahun-tahun selanjutnya GDP per kapita mengalami penurunan hingga tahun 2015 berturut-turut adalah US\$ 3,631.7, US\$ 3,499.6 dan US\$ 3,346.5. Kemudian jika GDP per kapita Indonesia dibandingkan dengan GDP per kapita negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia masih stabil di urutan kelima yang berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand dengan GDP per kapita berada di kisaran US \$ 3,000 an. GDP per kapita Indonesia juga masih cukup jauh berada di bawah Negara Cina sebagai negara yang mempunyai permasalahan pertumbuhan penduduk. GDP per kapita Cina berada di angka

US \$ 8,027,7 yang artinya sekitar dua kali lebih besar dari GDP per kapita Indonesia pada tahun 2015.

Tabel 1.1
GDP Per Kapita Negara-Negara Asia Tenggara

NO	NEGARA	GDP PER KAPITA (US \$)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Singapura	53,093.7	54,451.2	55,617.6	56,007.3	52,888.7
2	Brunei Darussalam	46,377.9	46,973.9	43,970.5	41,023.9	30,554.7
3	Malaysia	10,427.8	10,834.7	10,971.4	11,305.9	9,768.3
4	Thailand	5,539.5	5,915.2	6,225.1	5,969.9	5,814.8
5	Indonesia	3,647.6	3,700.5	3,631.7	3,499.6	3,346.5
6	Filipina	2,371.9	2,604.7	2,786.0	2,873.1	2,904.2
7	Vietnam	1,542.7	1,754.5	1,907.6	2,052.3	2,111.1
8	Laos	1,297.5	1,445.4	1,700.5	1,754.9	1,818.4
9	Myanmar	1,150.6	1,136.8	1,134.9	1,227.1	1,161.5
10	Kamboja	879.2	946.5	1,024.6	1,094.6	1,158.7
11	Timor Leste	1,024.6	1,125.4	1,111.8	1,154.2	1,158.0

sumber : *world development indicator* Bank Dunia

Tabel GDP per kapita di atas memberikan gambaran GDP per kapita antar waktu dan antar negara sehingga dapat terlihat pertumbuhan ekonomi negara-negara terkait yang juga merupakan gambaran tingkat kemakmuran masyarakatnya. Semakin tinggi GDP per kapita artinya perekonomian makin tumbuh dan kemakmuran masyarakat makin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2004). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Selain GDP per kapita, pada tingkat wilayah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat digunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada prinsipnya adalah menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Salah satu contohnya PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggambarkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah produk barang maupun jasa di Wilayah Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi dengan satu kota madya (Yogyakarta) dan empat kabupaten (Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo). Masing-masing daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Pendapatan asli daerah yang berbeda-beda tersebut tentu mempengaruhi belanja daerah. Perbedaan ini memungkinkan adanya perbedaan pertumbuhan PDRB. Maka untuk mengurangi ketimpangan keuangan daerah, pemerintah pusat melakukan perimbangan keuangan salah satu bentuknya adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah

kabupaten/kota (Widjaja, 1998) dalam Kamilah (2014). Pemerintah daerah melalui pendapatan daerah dan belanja daerah diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut data statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016), PDRB baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya kenaikan terus menerus. Kenaikan tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
PDRB Tahun 2011-2015 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(dalam juta rupiah)

No.	Tahun	PDRB ADHK	PDRB ADHB
1	2011	68.049.874	71.369.958
2	2012	71.702.449	77.247.861
3	2013	75.627.450	84.924.543
4	2014	79.532.277	92.829.330
5	2015	83.461.574	101.396.117

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016 BPS DIY

Namun demikian jika dilihat dari kontribusi antar kabupaten, terdapat ketimpangan kontribusi PDRB. PDRB lintas waktu dan lintas daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman menghasilkan PDRB terbesar, sedangkan Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten dengan nilai PDRB terkecil. Pada tahun 2015, kontribusi Sleman terhadap total PDRB provinsi mencapai 33,22 persen, kemudian diikuti Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo masing-masing sebesar 26,46 persen, 19,17 persen, 13,61 persen, dan 7,54 persen.

Untuk lebih jelasnya PDRB per kabupaten dan kota atas dasar harga berlaku dapat ditunjukkan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kota di Proinsi DIY
(dalam juta rupiah)

Kab/ Kota Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2011	5.500.251	13.290.667	9.739.094	23.764.366	18.997.186
2012	5.916.574	14.510.832	10.545.355	25.732.249	20.536.855
2013	6.489.594	16.138.755	11.530.341	28.295.363	22.537.792
2014	7.034.256	17.977.499,1	12.564.331	30.812.984	24.676.862
2015	7.662.301	19.486.839	13.834.228	33.756.236	26.889.124

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016 BPS DIY

Jika PDRB menggambarkan kemampuan menciptakan nilai tambah dalam suatu wilayah, PDRB per kapita adalah kemampuan individu untuk menciptakan nilai tambah barang atau jasa. Dari sisi PDRB per kapita, PDRB per kapita Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di urutan terbawah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
PDRB per Kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa
(dalam ribu rupiah)

Prov/ Thn	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur
2012	138.858	25.272	30.202	22.865	21.744	32.770
2013	155.170	27.765	33.195	25.040	23.623	36.035
2014	174.824	30.110	36.972	27.613	25.693	39.903

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016 BPS DIY

Untuk melakukan perkembangan kegiatan dalam perekonomian melalui peningkatan PDRB, pemerintah telah melaksanakan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih bebas dan mandiri baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah. Penerimaan daerah dapat berupa pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, yang disebutkan dalam pasal 5 Undang Undang No. 33 tahun 2004. Penerimaan daerah akan dialokasikan dalam berbagai belanja daerah pada program dan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat sesuai prioritas daerah. Salah satu wujud belanja daerah tersebut adalah belanja modal. Belanja modal yang tepat sasaran diharapkan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur dengan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Iskandar, 2012) dalam Mayendra (2014). Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tahun 2015 di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
PAD, DAU, Belanja Modal, Total Pendapatan Dan Total Belanja
Kabupaten Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015

(dalam ribu rupiah)

Kab/ Kota	PAD	DAU	BM	Total Pendapatan	Total Belanja
Bantul	390.624.492	942.850.827	334.880.395	1.951.223.236	1.784.169.348
Gunung Kidul	196.099.244	872.566.961	238.175.034	1.599.005.995	1.425.246.898
Kulon Progo	170.822.326	657.260.489	226.055.713	1.227.474.672	1.142.545.631
Sleman	643.130.079	984.410.612	426.782.827	2.294.622.764	2.153.925.095
Kota	510.548.822	622.365.351	256.395.156	1.434.009.588	1.539.699.344

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan kabupaten/kota di DIY

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa dari sisi pendapatan daerah dana alokasi umum merupakan penyokong pendapatan daerah yang paling besar

bahkan di Kabupaten Gunung Kidul DAU empat kali lebih besar dibandingkan PAD nya. PAD kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sangat terlihat kesenjangannya, misalnya PAD di Kabupaten Sleman hampir empat kali lebih besar dari PAD Kabupaten Kulon Progo. Sama halnya dengan PAD, belanja modal pada lima kabupaten kota di Provinsi D.I. Yogyakarta juga bervariasi besarnya, misalnya belanja modal Kabupaten Sleman hampir dua kali dari belanja modal Kabupaten Kulon Progo. Belanja modal pada lima kabupaten kota tersebut juga mempunyai serapan atau realisasi yang bervariasi dalam tahun 2011 hingga 2015. Penyerapan anggaran belanja modal paling rendah terjadi pada tahun 2011 di Kabupaten Gunung Kidul yang hanya sebesar 61,57% dari jumlah yang dianggarkan.

Belanja daerah dan pendapatan daerah adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Besarnya pendapatan daerah akan mempengaruhi besarnya belanja daerah demikian pula kebutuhan akan belanja daerah dapat menyebabkan pemerintah daerah harus memikirkan pendapatan daerah. Pendapatan dan belanja daerah baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mayendra (2014) dengan judul *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi*

Sumatera Barat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa variabel PAD dan belanja modal kabupaten dan kota di Sumatera Barat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Berbeda dengan Mayendra, penelitian Kamilah (2014) dengan judul *Analisa Hubungan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*, berkesimpulan bahwa variabel DAU kabupaten dan kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, namun variabel belanja modal adalah signifikan dengan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Nilai PDRB per kapita Provinsi DIY selama beberapa tahun terakhir terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
2. Terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah dan belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi DIY.
3. Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan berupa dana alokasi umum yang menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah dalam penelitian. Penelitian dibatasi hanya hal-hal berikut:

1. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi DIY tahun 2011 sampai dengan 2015.
2. Dana alokasi umum kabupaten dan kota di Provinsi DIY tahun 2011 sampai dengan 2015.
3. Belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi DIY tahun 2011 sampai dengan 2015.
4. PDRB dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi DIY tahun 2011 sampai dengan 2015.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi DIY?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi DIY?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi DIY?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui, menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015.
2. untuk mengetahui, menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015.
3. untuk mengetahui, menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kepentingan Teoritis
 - a. Menambah wawasan pada bidang ekonomi pemerintahan terutama mengenai keterkaitan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi DIY.
 - b. Memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan.
 - c. Menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Provinsi DIY dan kabupaten dan kota, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan formulasi anggaran yang mengarah pada proses peningkatan perekonomian daerah.

3. Bagi Peneliti

- a. Sebagai wahana latihan penulisan ilmiah dalam rangka menerapkan ilmu ekonomi dan akuntansi pemerintahan yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Menambah pengetahuan, pengalaman, pengembangan pemikiran, dan wawasan yang berguna di masa sekarang dan yang akan datang.

